

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik Timur Tengah yang memicu krisis energi global, terkhusus pada terganggunya pasokan melalui Selat Hormuz sejak akhir Februari 2026, yang mengganggu rantai pasok energi secara luas sekaligus akhirnya menimbulkan lonjakan harga minyak dunia mencapai USD 90 per barel. Situasi tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, tetapi juga telah memaksa negara-negara di kawasan untuk beradaptasi dengan berbagai kebijakan. Salah satunya adanya penerapan *work from home* (WFH) sebagai bagian dari strategi pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Misalnya di Eropa, Komisaris Energi Uni Eropa Dan Jørgensen mendorong penerapan WFH sebagai bagian dari penghematan energi, disertai pengurangan batas kecepatan jalan raya 10 km/jam dan promosi transportasi umum, mengingat pemulihan pasokan memerlukan waktu panjang meski konflik mereda. Negara seperti Malawi di Afrika, juga menghadapi kenaikan harga pangan akibat biaya transportasi, sementara Tanzania kekurangan cadangan strategis minyak, memperburuk kerentanan regional.¹ Begitu juga respons yang sama terlihat di Asia, negara-negara seperti Pakistan menerapkan *Work Frome Home* (WFH) dua hari seminggu untuk staf non-esensial, Thailand mewajibkan pegawai negeri menerapkan WFH kecuali layanan publik, Vietnam juga telah mengimbau pelaku usaha menerapkan WFH, sementara Sri Lanka memangkas hari kerja menjadi empat hari, begitu juga Mesir mewajibkan satu hari WFH per pekan mulai April 2026. Badan Energi Internasional (IEA) juga merekomendasikan WFH untuk posisi yang

¹ Detik.news, “Dorongan Pemberlakuan WFH Demi Hemat Energi Juga Muncul di Eropa,” detikNews, 2026, <https://news.detik.com/internasional/d-8427061/dorongan-pemberlakuan-wfh-demi-hemat-energi-juga-muncul-di-eropa>.

memungkinkan, sebagai bagian dari manajemen permintaan energi global.² Adanya fenomena ini telah mencerminkan paradigma baru dalam kebijakan publik, di mana fleksibilitas kerja menjadi instrumen mitigasi krisis energi.³

Di Indonesia, pemerintah merespon hal tersebut dengan berbagai kebijakan yang serupa, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 di terbitkan pada 31 Maret 2026, yang menganjurkan pelaku usaha swasta menerapkan kebijakan WFH dalam satu hari seminggu sekaligus mendorong optimasi atau penghematan di tempat kerja, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang di terbitkan pada 30 Maret 2026 Nomor 3 Tahun 2026, telah mewajibkan ASN WFH setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini ditegaskan melalui konferensi pers pada 31 Maret 2026 melalui Menko Prekonomian Airlangga Hartarto, yang memproyeksikan penghematan BBM nasional Rp 59 triliun dan APBN Rp 6,2 triliun melalui pengurangan mobilitas 50% dan efisiensi energi. Langkah ini disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna, yang mendorong atau menekankan adanya transformasi budaya kerja adaptif dan digital. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menempatkan surat edaran sebagai objek utama, melainkan hanya sebagai konteks dari kebijakan. Objek utamanya adalah bagaimana komunikasi resmi pemerintah di dalam menyampaikan dan melegitimasi kebijakan WFH hemat energi melalui konferensi pers dan media sosial resmi, karena pada ranah itulah strategi pesan, framing, dan konstruksi makna publik terbentuk

Mengapa komunikasi resmi pemerintah menarik untuk diteliti? Karena penulis melihat komunikasi tersebut tidak hanya menyampaikan kebijakan, akan tetapi juga membentuk rasionalisasi, legitimasi, dan

² iea.org, "New IEA report highlights options to ease oil price pressures on consumers in response to Middle East supply disruptions," iea, 2026, <https://www.iea.org/news/new-iea-report-highlights-options-to-ease-oil-price-pressure-on-consumers-in-response-to-middle-east-supply-disruptions>.

³ Dewi Ratnaningsih, *Analisis Wacanan Kritis Sebuah Teori dan Implementasi* (Lampung: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2019).

penerimaan publik terhadap kebijakan yang bersifat situasional dan berimplikasi luas. Teks resmi pemerintah dapat dipahami sebagai arena produksi makna yang merujuk pada krisis energi, efisiensi kerja, dan kepentingan publik dalam konstruksi diskursif, ketika dilihat dalam konteks kebijakan WFH hemat energi. Maka itu menjadi alasan yang logis, mengapa pesan komunikasi resmi pemerintah dalam WFH hemat energi ini menjadi penting untuk diteliti secara ilmiah, supaya kita bisa melihat bagaimana bahasa kebijakan berfungsi sebagai instrumen legitimasi negara, sekaligus penting secara teoritis untuk memperluas penerapan Analisis Wacana Kritis van Dijk pada teks kebijakan resmi yang lahir dalam situasi krisis.⁴ Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk menawarkan lensa teoritis untuk mengurai bagaimana pesan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers dan media sosial resmi, dengan memeriksa dimensi teks (makrostruktur tema, superstruktur dan mikrostruktur), kognisi sosial pembuat wacana, serta konteks sosialnya.⁵

Meskipun penelitian menggunakan analisis wacana kritis telah digunakan untuk mengkaji isu energi di media online⁶, namun penelitian yang secara khusus menelaah konstruksi pesan komunikasi pemerintah mengenai kebijakan WFH hemat energi masih terbatas. Berbagai penelitian terdahulu hanya berfokus pada representasi isu lingkungan, teks berita atau wacana kebijakan secara umum, belum ada analisis wacana kritis pada komunikasi resmi pemerintah melalui konferensi pers dan media sosial institusional.⁷ Padahal, di ruang media sosial hari ini kanal komunikasi resmi tersebut

⁴ Stacie E. Goddard dan Ronald R. Krebs, "Rhetoric, Legitimation, and Grand Strategy," *Security Studies* 24, no. 1 (2015): 5–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09636412.2014.1001198>.

⁵ Ratnaningsih, *Analisis Wacanan Kritis Sebuah Teori dan Implementasi*.

⁶ Sri Andayani, Indra Tjahyadi, dan Hosnol Wafa, "ANALISIS WACANA KRITIS MODEL VAN DIJK DALAM PEMBERITAAN KRISIS ENERGI DI MEDIA DARING CNBCINDONESIA.COM," *Conference on Innovation and Application of Science and Technology CIASTECH*, no. Ciastech (2021): 177–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/ciastech.v0i0.3308>.

⁷ Sefira Amelia Rosadha et al., "Representasi Isu Lingkungan dalam Media Arus Utama Indonesia : Sebuah Analisis Wacana Krfitik," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5 (2025): 3731–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18838>.

merupakan ruang penting tempat pemerintah membangun legitimasi, tema, dan penerimaan publik terhadap sebuah kebijakan. Atas dasar itu, penelitian ini memiliki tempat kebaruan dalam penerapan model Tuen A. van Dijk pada korpus komunikasi resmi terkini, untuk mengungkap bagaimana narasi terkait efisiensi, transformasi budaya kerja, kondisi, dan ketahanan energi dikonstruksi dalam komunikasi pemerintah.

Penelitian ini akan terbatas pada konstruksi pesan komunikasi pemerintah mengenai kebijakan WFH hemat energi yang disampaikan melalui konferensi pers dan media sosial resmi pemerintah (Instagram @kemenpanrb, @kemensetnegri, dan @kemnaker). Sementara fokus penelitian tidak diarahkan pada keseluruhan kebijakan WFH, melainkan pada bagaimana pesan, legitimasi, dan framing kebijakan dibangun dalam komunikasi resmi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, surat edaran, dokumen kebijakan, dan berita pendukung hanya digunakan sebagai konteks kebijakan atau data sekunder, bukan sebagai objek utama analisis. Begitu juga dengan penerimaan khalayak, efektivitas kebijakan, ataupun dampak langsung kebijakan terhadap perilaku masyarakat tidak akan dibahas dalam penelitian ini, karena fokus peneliti berada pada isi dan konstruksi wacana pesan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pemerintah mengonstruksikan pesan dalam kebijakan WFH hemat energi melalui komunikasi resmi pada konferensi pers dan media sosial resmi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemerintah membangun pesan dalam kebijakan WFH hemat energi melalui komunikasi resmi pada konferensi pers dan media sosial resmi dengan menggunakan model Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praksis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Dari penelitian ini di harapkan dapat memperkaya kajian dalam Ilmu Komunikasi, terkhusus pada komunikasi kebijakan publik, serta AWK van Dijk
- b. Peneliti juga berharap, tulisan ini dapat berkontribusi pada penerapan model van Dijk degan objek komunikasi digital pemerintah, sebab media sosial telah menjadi kanal penting sebagai penyebar informasi, pembentukan citra, dan membangun hubungan dengan publik.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dalam merancang strategi komunikasi publik yang lebih efektif, efisien, jelas dan mudah dipahami publik
- b. Untuk Mahasiswa jurusan komunikasi dan komunikasi penyiaran Islam, penelitian ini dapat menjadi contoh bagaimana penerapan model AWK pada teks komunikasi resmi pemerintah, khususnya pada media sosial dan konferensi pers.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian diharapkan mampu meningkatkan literasi kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah di ruang digital, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga memiliki kemampuan untuk membaca tujuan dan strategi komunikasi dibalikny.